

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pada akhir tahun 2019 di negara China lebih tepatnya di Kota Wuhan ditemukan virus baru yang dikenal dengan corona virus atau disebut juga Covid-19. Menurut para ahli virus corona adalah sejenis virus yang ditimbulkan dari hewan liar yang dikonsumsi oleh manusia, jika hewan liar yang dikonsumsi terdapat virus tersebut maka akan menimbulkan penyakit pneumonia atau radang paru-paru. Penularannya sangat cepat dan mudah sehingga pada awal tahun 2020 virus ini menjadi perhatian seluruh negara di dunia.

Penyebaran yang sangat cepat menyebabkan negara-negara maju dan berkembang khawatir dengan adanya virus tersebut. WHO menyebutkan pandemi Corona Virus sebagai wabah penyakit yang sangat mempengaruhi global dalam segala bidang, salah satu bidang yang sangat terpengaruh oleh virus tersebut adalah bidang ekonomi (Ibrahim, 2020).

Pencegahan virus tersebut agar tidak menular lebih cepat dengan cara menjaga jarak atau lebih dikenal dengan *physical distancing*. Pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan kasus pertama pada tanggal 2 Maret 2020, wabah penyakit virus corona ini terus meluas dan masih berlanjut, total kasus pandemi Covid-19 hingga Oktober 2020 telah memakan korban sebanyak 357.762 Jiwa,

pengumpulan pasien yang terkena virus ini pulih pada hari ini mencapai 281.592 atau 78% (Salsabila, 2020).

Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mencegah dampak atau penyebaran dari virus corona. Kebijakan sudah diupayakan oleh pemerintah mulai dari Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB), WFH untuk para pekerja, dunia hiburan diliburkan, pendidikan kegiatan belajar mengajar dilakukan dirumah, dan masih banyak lagi.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat membatasi masyarakat sipil untuk berkerumun seperti di pasar tradisional, pusat kota, tempat wisata dan bahkan karyawan perusahaan terkena dampak dari pandemi karena mengalami kemunduran dalam segi kinerja masyarakat karena hal tersebut banyak karyawan yang terkena pemutusan kerja diakibatkan perusahaan sulit dalam menjalin kerjasama karena di pengaruhi oleh pandemi virus corona ini.

Dalam kebijakan yang di umumkan oleh pemerintah menimbulkan konflik sosial kepada masyarakat yang mengakibatkan kesulitan dalam bidang ekonomi, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dari berbagai profesi mulai dari pengusaha, karyawan hingga para pedagang. Fenomena ini sangat memberi pukulan kepada masyarakat yang terkena dampak hidup dalam keterbatasan untuk menghindari penyebaran virus ini, dan berharap tinggi akan pandemi ini cepat berakhir.

Corona virus berdampak ke sektor perekonomian global pada kuartal ke-I pada tahun 2020 ini menjadikan fenomena tak terduga bagi dunia, bahkan organisasi internasional seperti *International Monetary Fund* dan *World Bank*

mempunyai bayangan akan terjadi penurunan sampai negative 2.8% bahkan hingga 6% dari perkembangan ekonomi dunia pada periode sebelumnya (Dito Aditia Darma Nasution, 2020).

Indonesia pun terkena imbas akan fenomena Covid-19 berdasarkan dari PDB (Produk Domestik Bruto) pada Triwulan ke-II 2020 mengalami penyusutan hingga -5,32% sedangkan pada Triwulan ke-I 2020, maka penyusutan -4,19%. Maka berdasarkan data tersebut membuat ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan negatif pada kuartal ke-II 2020. (Wuryandani, 2020).

Penurunan perekonomian menjadi konflik sosial, namun sebagian kelompok masyarakat merubah sifat konflik tersebut menjadi fungsional, seperti halnya masyarakat yang berprofesi di bidang *Home industry* memanfaatkan kebijakan pemerintah yang untuk meningkatkan perekonomian dan menjadikan konflik sosial ini menjadi konflik fungsional.

Agar masyarakat dapat bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti, masyarakat kini mulai banyak yang memulai usaha kecil-kecilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu usaha yang mulai banyak dijalani masyarakat ditengah pandemi Covid-19 adalah usaha kecil atau *Home industry*. Seperti yang terkandung di Undang-Undang nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha kecil Pasal 1 ayat 1 menjelaskan kegiatan ekonomi rakyat skala kecil dan memenuhi kriteria bahwa kekayaan bersih atau pendapatan penjualan tahunan lebih besar dari kekayaan bersih dan hasil penjualan dan kepemilikan tahunan sebagaimana yang sudah diatur oleh konstitusi.

Home industry adalah sebuah usaha yang biasanya bersifat tradisional, dalam hal ini berarti tidak ada pembagian kerja dan sistem untuk pembukuan yang jelas (Tambunan, 2002). *Home industry* di Indonesia sangat beragam bidang usaha, Indonesia terkenal dengan *Home industry* yang sangat berperan di berbagai bidang usaha, sebagian besar *Home industry* yang menjanjikan di Indonesia yaitu industri makanan atau kuliner, pakaian dan busana karena memanfaatkan peluang untuk setiap manusia mengenai kebutuhan primernya.

Cibuntu Selatan salah satu daerah di kota Bandung, yang identik dengan *Home industry*nya sebagai pengusaha pangan tahu dan tempe, adanya pandemi Covid-19 tidak mengalami kemunduran, bahkan dengan adanya pandemi ini dapat meningkatkan perekonomian bagi sebagian masyarakat di Cibuntu, karena ketika pengusaha pangan lain memberhentikan sementara usaha mereka, masyarakat Cibuntu menjadikan peluang itu untuk memperbesar volume produksi.

Meskipun awalnya masyarakat Cibuntu kesulitan dalam mencari bahan dasar tahu yaitu kacang kedelai yang biasanya mengimpor dari China dan Amerika kini tidak mendapatkan akses karena terkena dampak Covid-19 tersebut.

Dalam mengatasi hal ini masyarakat disana melakukan penghematan akan sisa dari kacang kedelai impor lalu diolah dengan kacang kedelai lokal agar produksi tetap berjalan dan tidak mengurangi cita rasa dan kualitas yang dihasilkan. Sehingga masyarakat Cibuntu tidak mengalami kesulitan perihal produksi tahu, melihat fenomena Covid-19 ini membawa dampak buruk ke

perekonomian masyarakat Indonesia, sehingga membuat masyarakat hidup hemat, membeli bahan makanan yang mudah dijangkau.

Dengan fenomena pandemi Covid-19 tersebut menjadikan ladang rezeki bagi para pengrajin tahu yang ada di daerah Cibuntu, sehingga home industry masyarakat Cibuntu beiringan dengan fenomena Covid-19 dalam segi pendapatan meningkat berbeda dengan masyarakat yang mengalami kemunduran perekonomian di masa pandemi ini.

Dalam menghadapi konflik tersebut masyarakat Cibuntu Selatan memanfaatkan konflik dari kebijakan pemerintah untuk masyarakat pada umumnya, dengan adanya pandemi Covid-19 ini menjadikan sebuah keuntungan dalam menaikkan omset yang berbeda dari biasanya. Berdasarkan dari latar belakang dalam mengkaji permasalahan tersebut penulis bertujuan melakukan penelitian pada masyarakat yang berada di tempat tinggalnya dalam memanfaatkan pandemi Covid-19. Hal ini yang berada di daerah Cibuntu Selatan Kecamatan Bandung Kulon Kelurahan Warung Muncang yang berada di Kota Bandung tersebut, dengan judul **“KONFLIK FUNGSIONAL KEBIJAKAN PEMERINTAH DI PANDEMI COVID-19 TERHADAP *HOME INDUSTRY*”** (Studi Kasus Pengrajin Tahu di Cibuntu Selatan Kecamatan Bandung Kulon Kelurahan Warung Muncang-Kota Bandung).

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut;

1. Ditemukanya virus baru yang bernama Covid-19
2. Efek samping dari Covid-19 bagi negara
3. Transmisi dari Covid-19 yang sangat meluas
4. Kebijakan Pemerintah untuk mengatasi Covid-19
5. Menjadikan konflik fungsional pada Covid-19 dari kebijakan pemerintah di daerah Cibuntu Selatan Kecamatan Bandung Kulon Kelurahan Warung Muncang Kota Bandung.
6. Persepsi dan sudut pandang masyarakat *home industry* di Cibuntu yang menjadikan wabah pandemi Covid-19 menjadi celah sebagai sumber penghasilan.

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konflik fungsional di *home industry* tahu pada pandemi Covid-19?
2. Bagaimana dampak dari kebijakan pemerintah pada masyarakat *home industry* tahu di pandemi Covid-19?

1.4. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui konflik fungsional pada pandemi Covid-19 di masyarakat *home industry* Cibuntu Selatan Kecamatan Bandung Kulon Kelurahan Warung Muncang Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui dampak dari kebijakan pemerintah terhadap masyarakat *home industry* di Cibuntu Selatan Kota Bandung.

1.5. Manfaat Penelitian

Ada beberapa hal yang dapat dilihat atau dikaji dari manfaatnya baik secara akademis maupun praktis, untuk meneliti fenomena ini, sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis

Dengan melakukan penelitian ini akan memberi manfaat kepada peneliti berupa ilmu untuk mengetahui lebih dalam tentang fenomena sosial pada pandemi Covid-19 di daerah Cibuntu Selatan Kecamatan Bandung Kulon Kelurahan Warung Muncang Kota Bandung, sehingga menjadikan peluang dan lebih peka terhadap realitas di masyarakat lebih jauh dengan didasari teori-teori sosial.

Demikian dari penelitian inipun juga dapat memberi sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Sosiologi, walaupun dalam bentuk yang minimal dan sederhana.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis kegunaan dari penelitian ini bertujuan untuk masyarakat agar bisa lebih memahami atau peka terhadap lingkungan sekitar dan realitas sosial, dan memahami fenomena pandemi Covid-19 ini menjadikan cerminan bagi seluruh masyarakat industri yang memberi dampak positif bagi kesehatan, diharapkan masyarakat lebih berinovasi dalam hal pemasaran untuk menghindari penyebaran virus dan bisa meningkatkan perekonomian. Semoga penelitian ini bisa memberi wawasan yang berhubungan dengan fenomena sosial, khususnya bagi program studi Sosiologi fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

1.6. Kerangka Pemikiran

Kebijakan pemerintah adalah kebijakan yang di tuju dari negara untuk masyarakatnya, kebijakan ini pada dasarnya untuk menyampaikan kepentingan umum dalam berbagai status berupa informasi dan aturan, dan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yang terhubung pada kehidupan masyarakat (Ali, 2012).

Pandemi Covid-19 sendiri merupakan salah satu wabah penyakit baru yang muncul pada akhir tahun 2019, dimana banyak sekali negara di dunia ini yang terkena pandemi Covid-19. Pandemi tersebut banyak berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, bukan hanya dari segi kesehatan saja namun juga sosial, ekonomi, pendidikan dan lainnya.

Munculnya pandemi Covid-19 menjadikan wabah penyakit ini sebagai awal dari perubahan sosial secara tiba-tiba tentu bukan hanya membuat masyarakat mengalami kebingungan, tetapi pemerintah juga melakukan banyak perubahan dan kebijakan-kebijakan baru dengan mempertimbangkan berbagai aspek demi kebaikan seluruh masyarakat.

Kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan Covid-19 ini tentu memiliki dampak bagi masyarakat, menimbulkan konflik di masyarakat diantaranya pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk menanggulangi virus corona ini.

Salah satu contoh kebijakan pemerintah khususnya di negara Indonesia yang diterapkan hampir oleh seluruh instansi dan masyarakat adalah *Work From Home*

(WFH) dengan tujuan melindungi masyarakat dari penyebaran virus Covid-19 dimana kebijakan ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”), di mana setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja.

Selain itu terdapat pula kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai daerah yang bertujuan untuk membatasi ruang gerak masyarakat sehingga dapat menekan penyebaran virus Covid-19. Maka dari kebijakan pemerintah tersebut mengandung konflik bagi masyarakat yang terkena atau terkekang oleh dampak fenomena Covid-19 ini.

Merubahnya kebiasaan masyarakat yang biasanya melakukan dengan bebasnya berinteraksi atau berkegiatan sosial kini dibatasi bertujuan untuk mencegah penyebaran corona virus ini. Selain dari dampak sosial dan kesehatan, virus ini pun berdampak pada ranah perekonomian diakibatkan dari kebijakan pemerintah yang membatasi kegiatan sosial hal, maka terjadinya konflik sosial yang menjadi masalah di bidang biologi oleh wabah penyakit corona virus ini.

Akan tetapi pada suatu konflik, yang berdasarkan dari kebijakan tentu tidak semuanya dipandang negatif, adapula kebijakan yang sebagaimana bersifat mendukung bagi kelompok tertentu atau dijadikan peluang dalam kebijakan tersebut. Berdasarkan dari definisi konflik kebijakan itu sendiri merupakan konflik yang mungkin terjadi karena individu atau kelompok memiliki pendapat

yang berbeda tentang perbedaan kebijakan antara satu pihak dengan kebijakan lainnya.

Sehingga kebijakan-kebijakan tersebut memiliki dampak positif maupun negatif, dampak positif sendiri dapat dilihat dengan melambatnya penyebaran virus Covid-19 ditengah masyarakat sedangkan dampak negatif nya sangat terlihat pada bidang ekonomi. Saat ini banyak masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya baik karena bisnis atau usaha yang terhambat karena adanya virus ini maupun banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Pada fenomena pandemi ini juga menjadikan peluang bagi masyarakat *Home industry* menjadikan perubahan situasi dan pola hidup masyarakat karena adanya Covid-19 menyebabkan masyarakat mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menjalankan *home industry*, *home industry* adalah usaha yang bergerak dengan ruang lingkup kecil yang memfokuskan kepada salah satu bidang tertentu.

Konflik fungsional menurut Lewis Coser sendiri merupakan salah satu alat atau cara untuk mempersatukan, dan menahan bahkan berfungsi untuk menekan sistem sosial, seperti halnya jika kelompok tersebut tidak terancam oleh konflik dengan pihak luar yang bermusuhan, tekanan kuat pada kohesi, kepatuhan, dan komitmen kepada kelompok kemungkinan besar akan berkurang drastis. Perbedaan internal dapat muncul dan didiskusikan, penyimpangan mungkin lebih

dapat ditoleransi, dan secara umum, individu akan memiliki lebih banyak ruang untuk mencapai tujuan pribadinya.

Seperti hal *Home industry* merupakan solusi pada pandemi ini, merubah konflik bagi masyarakat pada umumnya diubah menjadi suatu peluang dalam meningkatkan kebutuhan dan menjadikan peluang untuk mewujudkan tujuan pribadi atau kelompok, karena *Home industry* tidak terkena oleh ancaman konflik, melainkan menjadikan konflik ini sebagai peluang untuk meningkatkan pendapatan.

Home industry ini menggunakan tempat tinggalnya untuk melakukan produksi. Sehingga dalam pengeluaran modal tidak terlalu besar dan tidak terikat oleh instansi kelembagaan karena *Home industry* pemiliknya orang yang punya rumah tersebut dengan keuntungan dari peluangnya untuk memperhatikan wilayah yang dibutuhkan sesuai dengan keadaan.

Hal ini berlaku juga pada masyarakat sekitar Cibuntu Selatan yang terkenal oleh eksistensi *Home industry* makanan pokoknya yang menjadikan masa pandemi Covid-19 pendapatan masyarakat bergantung pada home industry pembuatan tahu.

Berbeda dengan masyarakat lain yang pendapatannya berkurang semenjak pandemi Covid-19, masyarakat Cibuntu mengalami kenaikan pendapatan dari usaha home industry yang dijalankan, hal ini menggambarkan terjadinya konflik fungsional di tengah masyarakat Cibuntu.

Maka dengan demikian pemanfaatan konflik yang terjadi pada pandemi Covid-19 ini dimanfaatkan oleh masyarakat Cibuntu merubah konflik yang berdampak pada perekonomian menjadikan sumber dalam peningkatan perekonomian *Home industry* pengrajin tahu.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1. Skema Pemikiran